

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi Pemerintah merupakan penyelenggara pemerintahan dan pengguna anggaran negara yang wajib melakukan pengelolaan keuangan dalam mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan suatu perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Tata kelola pemerintahan merupakan salah satu cerminan dari kualitas pelayanan pemerintah. Masyarakat menuntut organisasi pemerintah memiliki tata kelola yang disebut Good Government Governance. (Warsito, 2014)

Salah satu syarat utama untuk mewujudkan suatu aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan adalah penyelenggaraan tata kelola tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk 4terbuka (*open government*). Oleh karena itu diperlukannya pengembangan system pertanggungjawaban yang jelas, nyata dan tepat sehingga penyelenggaraan pemerintah demi kemakmuran rakyat dapat dimanfaatkan, bersih, bertan ggungjawab, dan berhasil guna. Pada praktiknya, pengelolaan pemerintahan yang baik adalah bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang berkaitan pada kepentingan rakyat dimana semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan diperlukannya transparansi (Zaghena, Mamentu, dan Mingkid (2022: 2))

Dalam instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*AKIP*) dinyatakan bahwa dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya “pelaporan” akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi pemerintahan. Laporan ini menjelaskan kinerja lembaga pemerintah yang kompeten melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Keluarnya penerapan sistem SAKIP, maka dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bergeser suatu pemahaman tentang "seberapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan" menjadi "seberapa besar kinerja yang telah dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode bisa tercapai". (Mardiasmo, 2002)

Kinerja Pemerintah Daerah adalah hasil dari implementasi masalah pemerintahan regional yang diukur dengan input, proses, hasil, atau konsekuensi. Laporan Kinerja tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021. Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran telah dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021–2026 dengan harapan fungsi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat berfungsi kembali ditengah kehidupan bermasyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial yang dielaborasi dari visi Gubernur Sumatera Barat yaitu

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan” dengan misi ke-1 yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing” maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah “Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dan “Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani”. Selanjutnya berorientasi dari tujuan tersebut maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial”, “Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial”, “Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)”, “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”, dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mempelajari dan membahas bagaimana proses dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan kedalam Tugas Akhir dengan judul **“Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut, terdapat beberapa hal yang akan dibahas dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Bagaimana Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat?

2. Apa saja kendala yang di dapat dalam Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Bagaimana Upaya dalam mengatasi kendala dalam Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

Dari kegiatan penulisan tugas akhir ini penulis dapat mengambil tujuannya yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk Mengetahui Kendala dalam proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala dalam Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

1. Untuk dapat mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan pada masa yang akan datang.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar pengelolaan keuangan Pada Dinas Sosial.

3. Untuk Mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja dan mengaplikasikan teori yang didapat penulis dengan implementasinya di dunia kerja.

1.5 Metode Pengumpulan Data

a. Study Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang menjadi objek Magang sehingga dapat diperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan magang. Adapun teknik penelitian lapangan yang dilakukan yaitu:

1. Mengadakan wawancara dengan karyawan perusahaan terkait
2. Pencarian data melalui internet untuk mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait.

b. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari buku dan juga laporan-laporan yang berhubungan dengan tulisan ini, serta sumber informasi lain untuk mendapatkan bahan dan teori yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan nantinya.

c. Metode Analisis Data

Study ini untuk menganalisis teori yang telah diterima penulis dari perkuliahan dengan kenyataan dilapangan untuk mencari letak perbedaannya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Penulis melaksanakan kegiatan magang ini selama 40 hari kerja yaitu dari tanggal 09 Januari 2023 s/d 06 Maret 2023 yang dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang beralamatkan di Jalan Khatib Sulaiman No.5.

1.7 Sistematika Tugas Akhir

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab pertama ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Magang, Metode pengumpulan Data, Tempat Dan Waktu Magang, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini merupakan landasan teori yang membahas dan juga menjelaskan Pengertian Laporan, pengertian akuntabilitas, pengertian kinerja, pengertian pengukuran kinerja, manfaat pengukuran kinerja, pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, prinsip penyampaian LAKIP, manfaat LAKIP, tujuan LAKIP, dasar hukum pemberlakuan LAKIP.

BAB III Gambaran Umum

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV Pembahasan

Bab ini menjelaskan bagaimana proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kendala yang didapat dalam Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Upaya dalam mengatasi kendala dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

BAB V Penutup

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan penulisan laporan dari pengamatan yang sudah dilakukan, yang dijadikan saran bagi instansi juga pihak-pihak yang berkepentingan di masa depan.

